



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 1004388

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 94.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 38.844.022

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 728.844.022

III. HUTANG Rp. 450.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 278.844.022

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.